



**IR 101** merupakan sebuah artikel pengetahuan dasar yang ditulis oleh akademisi/mahasiswa Hubungan Internasional dengan tujuan sebagai landasan pengetahuan mendasar bagi para akademisi/mahasiswa Hubungan Internasional. Maka dari itu, artikel ini tidak dapat dijadikan sumber/sitasi dalam keperluan penelitian akademik.

---

## **IR101: ORGANISASI KAWASAN**

### **ASEAN: Tantangan Kerjasama dengan Jepang mengenai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Prospek APSC (*ASEAN Political-Security Community*)**

Charisya

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau dalam bahasa Indonesia berarti Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*) atau biasa disebut "*ASEAN Declaration*", oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina.<sup>1</sup> Organisasi ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya.

---

<sup>1</sup> AK. Syahmin SH., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*. (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), Hlm. 209.

ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara dan juga bertujuan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan meningkatkan nilai demokrasi. Salah satu hal yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengatasi tantangan demokrasi yang ada ialah menjalin kerjasama dengan Jepang. Dalam upayanya ini, dirancang beberapa kegiatan sehingga terciptanya lah Cetak Biru APSC atau *Blueprint APSC*.

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan niat mereka untuk membentuk *ASEAN Security Community (ASC)* atau komunitas keamanan ASEAN. Kemudian, nama ini berganti menjadi *ASEAN Political-Security Community (APSC)*. Munculnya konsep APSC mencerminkan adanya perhatian ASEAN yang semakin besar terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu tujuan utama dari prospek APSC adalah membentuk “Komunitas berbasis aturan dengan nilai dan normal bersama” dengan “Mempromosikan pembangunan politik dengan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental”.<sup>2</sup> Acuan demokrasi pertama kali muncul dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II), diadopsi pada KTT ASEAN kesembilan pada oktober 2003. Kemajuan demokrasi ASEAN disertai dengan munculnya konsep ASC yang pertama kali diusulkan oleh Indonesia. Indonesia membawa konsep ASC dalam presentasi makalah konsep nya yang berjudul “Menuju Komunitas Keamanan ASEAN.” Yang menekankan agenda demokrasi dan hak asasi manusia.

*ASEAN Political-Security Community (APSC)* ini sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak cara para anggota ASEAN untuk mewujudkan keamanan kawasan. Sebagai salah satu dari tiga pilar ASEAN-APSC memfokuskan pada perdamaian kawasan. APSC memiliki upaya untuk membangun kawasan yang kohesif, damai, dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif. Dengan membentuk Langkah-langkah membangun kepercayaan guna mencegah konflik, membuat resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara damai, serta pasca konflik kemudian membangun perdamaian.

Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi ASEAN dalam memajukan demokrasi dan hak asasi manusia ialah :

1. *Tantangan pertama*, adanya disparitas yang lebar di antara anggota-anggota ASEAN atas kemauan politik masing-masing anggota tersebut. Padahal Indonesia dan Filipina sangat mendukung gagasan demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia di ASEAN dan kedua negara ini telah berjuang untuk mengkonsolidasikan demokrasi, *Civil Society Organization (CSO)* atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Negara-negara non demokratis tidak memiliki antusiasme dan mereka

---

<sup>2</sup> Sekretariat ASEAN, *Blueprint APSC* (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2009), Hlm 2-3.

memandang demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia sebagai ancaman terhadap tatanan politik domestik mereka. Hal ini berdampak pada beberapa referensi demokrasi dalam dokumen ASEAN, termasuk Cetak Biru APSC dan Piagam ASEAN menjadi abu-abu.

2. *Tantangan kedua*, munculnya badan hak asasi manusia yang cukup tidak efektif di ASEAN. Ini menunjukkan perasaan ambivalen ASEAN terhadap permasalahan hak asasi manusia. Pembentukan AICHR memang merupakan langkah signifikan dalam mendukung pemajuan hak asasi manusia di ASEAN. Namun, akibat dari penolakan sebagian besar anggota ASEAN, AICHR belum dilengkapi mekanisme investigasi yang dapat memantau dan melaporkan kembali pelanggaran hak asasi manusia, sehingga melemahkan kemampuannya dalam melakukan tugas “perlindungan hak asasi manusia”.<sup>3</sup>

ASEAN menghadapi tantangan yang sulit dalam memajukan agenda demokrasi dan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam prospek APSC. Sehingga, diluncurkannya Rencana Aksi ASEAN-Jepang tahun 2011-2015 yang diadopsi pada KTT ASEAN-Jepang ke-14 tahun 2011 dengan menetapkan beberapa bidang-bidang kerjasama di bidang demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia.

Jepang dan ASEAN memiliki kepentingan yang sama dalam membangun tatanan regional yang terbuka dan berbasis aturan di Asia Timur. Mengingat bahwa pembangunan tatanan regional seperti itu tidak akan pernah dapat dicapai tanpa ASEAN mampu mengubah dirinya menjadi entitas yang demokratis, keberhasilan kerjasama bilateral di bidang ini merupakan langkah penting menuju tujuan bersama mereka untuk mempromosikan komunitas keamanan yang tahan lama.

Dengan demokrasi menjadi wacana terdepan ASEAN, pemajuan demokrasi dimasukkan ke dalam tujuan kerjasama ASEAN-Jepang. Deklarasi yang dikeluarkan KTT ASEAN-Jepang ke-14 tahun 2011 mengikat Jepang dan ASEAN untuk memfasilitasi kerjasama untuk “peningkatan nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan dengan mendukung terwujudnya APSC”.<sup>4</sup> Sebagai salah satu negara demokrasi tersukses di Asia, Jepang diharapkan dapat memainkan peran utama dalam mendukung prospek demokrasi ASEAN. Namun, Implementasi kerjasama ASEAN-Jepang dalam demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia tampaknya bukan hal mudah. Karena beragamnya sistem politik dan ideologi di antara negara-negara ASEAN.

---

<sup>3</sup> Allan Collins, *Building a People Oriented Security Community the ASEAN Way*, Hlm 94-99.

<sup>4</sup> “Deklarasi Bersama untuk Meningkatkan Kemitraan Strategis Jepang-ASEAN untuk Kesejahteraan Bersama.” Bali, Indonesia, 18 November 2011.

Sejauh ini, asumsi dasar yang dapat ditarik penulis ialah **ASEAN dan Jepang melakukan kerjasama dalam pemajuan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam prospek APSC. ASEAN dan Jepang juga mengalami tantangan di dalam proses kerjasama tersebut.**

## **REFERENSI**

AK. Syahmin SH., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*.  
(Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988). Hlm 209

Collins, Allan. "*Building a People Oriented Security Community the ASEAN Way*".  
(United Kingdom: Routledge). 2017.

ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025 (Jakarta: ASEAN Secretariat).  
March 2016.

"Deklarasi Bersama untuk Meningkatkan Kemitraan Strategis Jepang-ASEAN untuk  
Kesejahteraan Bersama." Bali, Indonesia, 18 November 2011.

## LIGA ARAB

Tyara Syalsabila

Ide pembentukan organisasi internasional sudah ada sejak negara-negara melakukan hubungan internasional, di mana banyak negara ikut serta. Ide pembentukan organisasi internasional bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia dan untuk melawan kepentingan nasional masing-masing, dimana organisasi internasional akan menyatukan negara-negara dalam suatu sistem kerja yang dilengkapi dengan badan-badan yang dapat mencegah atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Di masa lalu, pembentukan organisasi internasional tidak semudah yang diharapkan, dan sebagian besar pemimpin percaya bahwa pembentukan organisasi internasional melanggar kedaulatan nasional dan kepentingan nasional. Namun, terlepas dari kebutuhan negara untuk membangun hubungan dengan negara lain, kebutuhan dan interaksi antar negara akibat globalisasi yang besar mengharuskan pembentukan lembaga internasional menjadi mungkin terjadi.<sup>5</sup>

Berkembangnya organisasi internasional termasuk perusahaan multinasional dan *Non Government Organization* (NGO) yang dapat mendukung dan mengerjakan kegiatan pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan birokrasinya yang rumit, mengakibatkan negara memberikan perlakuan khusus kepada organisasi internasional dikarenakan keadaan tersebut. Organisasi internasional dibentuk untuk memecahkan masalah internasional atau sebagai penghubung untuk kepentingan kerjasama internasional.

Peran organisasi internasional sangat penting, yang diwujudkan dalam kesadaran berorganisasi dalam skala internasional, oleh karena itu diyakini organisasi internasional mampu menciptakan perubahan baru dalam hukum internasional.<sup>6</sup> Untuk itu diperlukan suatu hubungan yang bercirikan kesepakatan antar negara yang menjadi anggota organisasi internasional. Banyak negara di kawasan telah membentuk organisasi untuk memfasilitasi kerjasama dan mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien, termasuk negara-negara Arab. Liga Arab adalah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara Arab di Timur Tengah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 Maret 1945 berdasarkan Perjanjian Pakta Liga Arab dan didirikan atas kesepakatan yang didasari atas budaya yang berakar pada bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu bahasa Arab.

---

<sup>5</sup> Boer, Muana, Hukum internasional pengertian peran dan fungsi dalam Era Dinamika global, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm 462.

<sup>6</sup> Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana, dkk, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humanitr Internasional Kontemporer, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 9.

## **Peran**

Liga Arab didirikan untuk membantu negara-negara Arab mengkoordinasikan kebijakan antar negara anggota untuk bersama-sama mengekspresikan kebijakan mereka kepada dunia internasional dan mengembangkan masa depan yang lebih baik bersama. Piagam Liga Arab menyediakan sarana untuk mengkoordinasikan politik, pendidikan, keuangan, hukum, keamanan, sosial, budaya dan komunikasi, serta bisnis, imigrasi dan hubungan kesehatan. Organisasi regional Liga Arab adalah Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Aljazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti, Komoro. Liga Arab berawal dari gagasan nasionalisme Arab (pan-Arabisme), yang menegaskan bahwa bangsa Arab harus bersatu untuk mengakhiri kekuasaan Eropa. Dari sudut pandang ini, tidak mengherankan jika negara-negara anggota Liga Arab memulai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Pertahanan (JDEC) lima tahun setelah dimulainya, yang mengamanatkan dukungan ketika negara-negara anggota diserang oleh negara lain. Kami tidak menggunakan kekerasan terhadap negara anggota lainnya. Organisasi Liga Arab telah berkembang dari waktu ke waktu sejak didirikan pada tahun 1945. Organisasi ini telah berkembang pesat dari 7 negara pendiri asli menjadi 22 negara pemberi suara dan 6 negara pemberi suara dan pengamat.

## **Studi Kasus**

Dalam perkembangannya, terjadi beberapa isu permasalahan yang terjadi di negara-negara Arab dan membuat organisasi Liga Arab mengambil peran untuk mendorong agar isu-isu permasalahan tersebut dapat teratasi dengan jalan perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah tetap terjaga. Beberapa isu-isu permasalahan tersebut adalah adanya konflik konflik yang terjadi antara negara Palestina dan Israel yang hingga detik ini belum menemukan titik penyelesaian, terjadinya konflik antara penganut agama Islam Sunni dan Islam Syiah di negara Bahrain, serta munculnya konflik yang terjadi di Yaman.<sup>7</sup>

Pertanyaan yang kemudian muncul, ketika sikap yang diambil oleh organisasi Liga Arab ini yang kontradiksi dengan apa yang seharusnya diambil oleh suatu organisasi regional di satu kawasan. Pada upaya penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Bahrain, Liga Arab memberikan respon dengan memberi dukungan penyerangan kepada pasukan Dewan Kerjasama Teluk terhadap negara Bahrain. Hal yang sama juga terjadi pada konflik yang terjadi di negara Yaman. Konflik Yaman ini awalnya muncul karena adanya konflik politik antara pemerintah Yaman Ali Abdullah Saleh dan para

---

<sup>7</sup> BBC, 2015. Middle East Region Conflicts. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east29319423> diakses pada 13 September 2022.

pendukungnya dengan para pemberontak pemerintah yang kemudian beraliansi dengan kelompok Houthi.

Setelah semakin gencarnya gerakan-gerakan protes dan pemberontakan dari berbagai lapisan masyarakat Yaman terkait pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang dianggap tidak demokratis dan terlalu diktator, Presiden Ali Abdullah Saleh kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan digantikan oleh Abd Rabbuh Mansur Hadi yang resmi menjadi pemimpin baru Yaman pada November 2011. Pergantian kekuasaan dari Ali Abdullah Saleh ke Abdur Rabbuh Mansur Hadi tidak serta merta menghentikan friksi dan konflik politik yang muncul di masyarakat Yaman. Konflik politik di masyarakat Yaman terus berlanjut dan meningkat hingga menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Yaman. Arab Saudi melihat konflik internal yang belum terselesaikan di Yaman dan meningkatnya ketegangan sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan di Timur Tengah. Beberapa negara anggota organisasi regional Liga Arab yang juga berafiliasi dengan Arab Saudi kemudian mengadakan pertemuan mengenai situasi di Yaman dan mendukung intervensi militer Arab Saudi terhadap Yaman yang kemudian diklaim sebagai wilayah pemberontak. Kelompok oposisi pemerintah dan sekutu Houthi.

Serangan oleh Arab Saudi dan sebelumnya disetujui oleh negara-negara anggota Liga Arab sebagai solusi atas ketidakstabilan Yaman tidak dapat benar-benar membuat kondisi Yaman menguntungkan, melainkan menciptakan masalah baru. Hal ini menyebabkan peningkatan ketegangan di Yaman dan mengubah apa yang awalnya hanya konflik politik internal Yaman menjadi perang proksi yang terjadi antara Yaman dan Arab Saudi. Arab Saudi mengklaim dukungan dari Iran untuk kelompok Houthi, yang bersekutu dengan kelompok oposisi pemerintah dan telah mengacaukan situasi di Yaman, dan konflik yang sedang berlangsung telah mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara antara negara-negara Yaman. Pemberontak Val dan Houthi ini, dengan Arab Saudi Arabia semakin parah. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meredakan ketegangan antara Iran, Yaman dan Arab Saudi atas masalah ini.

Di tingkat regional, Liga Arab telah mengadakan beberapa pertemuan bersama dengan seluruh negara anggota Liga Arab untuk membahas masalah konflik di Yaman dan berbagai konflik di negara-negara anggota Liga Arab. KTT Liga Arab ke-24 diselenggarakan pada 26-27 Maret 2013 di Doha, Qatar. Semua kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota Liga Arab berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan membahas perkembangan ekonomi dan sosial di negara-negara Arab. Selain itu, KTT Liga Arab ke-24 juga membahas rencana pembentukan Mekanisme Bantuan Keuangan Arab untuk membiayai pertanian dan ketahanan pangan di negara-negara anggota Liga Arab. Pada 2015, Liga Arab mengadakan pertemuan. teratas di Mesir. Liga Arab telah menyerukan pembentukan kekuatan regional untuk memerangi militan karena negara-negara anggota menghadapi ancaman yang berkembang dari

ISIS dan kelompok lain. Selanjutnya, negara-negara Liga Arab bertemu pada KTT Liga Arab ke-27, yang diadakan di Mauritania pada 25 Juli 2016, untuk membahas isu-isu yang muncul dan utama, termasuk isu-isu keamanan dan terorisme.

### **Sejarah Berdirinya Liga Arab**

Meski proposal Abdullah dan al-Sa'id ditolak oleh Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. Lalu, ide-ide ini mengarah pada pertemuan September 1944 di Alexandria, Mesir. Pertemuan tersebut disiapkan oleh Panitia Persiapan Konferensi Umum Arab (*Preparatory Committee of the General Arab Conference*), sehingga Protokol Alexandria disepakati dalam pertemuan tersebut. Protokol Alexandria adalah kesepakatan yang menempatkan Liga Arab sebagai wahana untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan ikatan yang mengikat semua negara Arab dan membawa mereka menuju kemakmuran di dunia Arab. Protokol Alexandrian berfungsi untuk memperbaiki situasi, mengamankan masa depan dan mewujudkan harapan dan aspirasi bersama. Mengklaim untuk melakukannya bersama-sama, dalam menanggapi opini publik Arab di semua negara Arab yang telah menandatangani bahwa Liga Arab harus mengkoordinasikan rencana politik untuk memastikan kerjasama dan melaksanakan kemerdekaan dan kedaulatan sesuai dengan agresi yang diproyeksikan dan secara umum memantau urusan dan kepentingan negara-negara Arab.<sup>8</sup>

Protokol menyatakan bahwa tidak ada yang dapat meminta kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara anggota. Di sisi lain, Liga Arab akan memiliki dewan yang akan mengintervensi perselisihan antar anggota yang dapat berujung pada perang antar anggota sehingga Liga Arab berperan dalam rekonsiliasi. Lebih lanjut, dokumen Alexandria mengungkapkan harapan agar negara-negara Arab dapat selangkah demi selangkah memperkuat hubungan mereka untuk menciptakan institusi masa depan yang akan mengikat negara-negara Arab. Ini menentukan jalan menuju tujuan pan-Arab dari negara-bangsa yang bersatu. Sejak penandatanganan Protokol Alexandria, beberapa kepala pemerintahan yang telah menandatangani dokumen tersebut telah dicopot. Mudtafa al-Nahas Pasha dari Mesir digantikan sebagai perdana menteri dan dikecam sebagai pengkhianat. Perdana menteri Suriah dan Yordania telah dipecat. Di Lebanon, Protokol Alexandria dikritik sebagai serangan terhadap kedaulatan lembaga baru, meskipun beberapa organisasi ingin memajukan organisasi di bidang koordinasi. Namun, dalam beberapa bulan, kelompok itu bertemu dan menulis piagam untuk Liga Arab. Hal ini memperhitungkan beberapa keberatan yang diajukan terhadap protokol Alexandria. Pada tanggal 22 Maret 1945, komite yang

---

<sup>8</sup> Cris E. Toffolo. *The Arab League (Global Organization)*. New York. Infobase Publishing. 2008, Hal. 4



merubah dirinya ke dalam Konferensi Pan-Arab dan menandatangani piagam Liga Arab tersebut. Tindakan ini secara resmi menandakan berdirinya Liga Arab.

### **REFERENSI**

Boer, M. (2008). Hukum internasional pengertian peran dan fungsi dalam Era Dinamika global. PT. Alumni Bandung.

Denny Ramdhany, H. J. (2015). Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Toffolo, C. E. (2008). The Arab League (Global Organization). New York.: Infobase Publishing.

BBC, 2015. Middle East Region Conflicts. <http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-29319423>, diakses pada 13 September 2022.

# UNI EROPA (*EUROPEAN UNION*)

Puput Heravina

## Pendahuluan

Berakhir nya perang dunia kedua, hal ini telah memberikan dampak yang sangat merugikan banyak pihak tentunya dari banyak sisi. berbagai negara di dunia khususnya negara negara yang tergabung dalam blok eropa Barat ingin mencoba untuk membangun kembali seluruh kota, baik dari segi infrastruktur maupun dari segi kemanusiaan nya. negara-negara tersebut berkeinginan untuk mengutamakan kemajuan negara melalui Kerjasama yang bisa memunculkan kekuatan baru agar bisa bersaing dengan negara negara kawasan lain. Tujuan utama dari pembentukan organisasi kawasan ini adalah ingin membangun kerjasama ekonomi yang kuat dan untuk mengurangi terjadinya konflik.

Uni Eropa memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukan nya. peperangan yang terjadi dimasa lalu menimbulkan kesadaran bahwa, hal tersebut memberikan dampak negatif yang menyebabkan negara negara itu tergabung dalam blok eropa barat. Yang dimana pada saat itu selama masa perang mereka merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang membuat negara negara tersebut melakukan usaha dan upaya upaya untuk mengantisipasi kemungkinan perang yang terjadi dimasa yang akan datang.<sup>9</sup>

Pada awalnya Uni Eropa ini adalah sebuah organisasi Kawasan yang memiliki anggota yang tergabung di dalam blok barat. Tetapi, seiring berjalan nya waktu dan mengalami banyak perkembangan, organisasi ini mulai memperluas dan melebarkan pengaruhnya ke wilayah lain, khusus nya semenjak keruntuhan dan jatuhnya Uni soviet serta Yugoslavia. Uni Eropa melakukan upaya demokratisasi dan eropanisasi ke negara negara baltik yang cukup memberikan hasil yang positif dan terbilang cepat. Dan kemudian, negara negara tersebut beralih mengubah ideologi nya dari sosialis menjadi demokratis dan tergabung menjadi anggota dari Uni Eropa pada akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000 an. Dalam proses penyebaran nilai nilai demokrasi, Uni Eropa melakukannya dengan cara yang lebih *soft* dan dapat diterima oleh negara lain. Selain itu, organisasi ini juga berencana melakukan upaya dalam menciptakan hubungan yang baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan negara negara tetangga baru nya khususnya di wilayah Eropa Timur.

Dalam memperluas eropanisasi ataupun pengaruh nya, Uni Eropa menyediakan dana melalui nilai atau pun kebijakan - kebijakan yang dibuat yang diperuntukkan kepada negara – negara yang bukan anggota. Perjalanan menuju pembentukan Uni

---

<sup>9</sup> Ismail, 2010. Sejarah dan Perkembangan Eropa.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12177/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Eropa dari masa awal mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup stabil dan signifikan. Dengan banyaknya negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa maka terbentuklah organisasi yang disebut dengan *European Union*.

Uni Eropa yang bisa disebut dengan *EU (European Union)*, merupakan sebuah organisasi Kawasan antarpemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Uni Eropa sendiri, sudah beranggotakan sebanyak 28 negara pada 31 Januari 2020 lalu. Uni Eropa terbentuk setelah terjadinya perang dunia kedua sebagai bentuk ataupun Langkah awal dalam mendorong Kerjasama ekonomi. Pada awalnya komunitas batu bara dan baja dibentuk dan didirikan pada tahun 1951, yang dimana hal ini dilakukan untuk menciptakan dan mengamankan perdamaian dunia. Dan kemudian, pada tahun 1957 Masyarakat Ekonomi Eropa dan era baru kerjasama dibentuk dan ditetapkan melalui Perjanjian Roma. Kemudian, Robert Schumann yang merupakan seorang Menteri Luar Negeri Prancis mengusulkan rencana dengan memperdalam Kerjasama untuk mengintegrasikan industri batu bara dan baja di Eropa barat pada tahun 1950 – 1951.

Dengan adanya rencana yang diusulkan oleh Schuman tadi, maka terdapat enam negara yang setuju dan menandatangani perjanjian tersebut untuk menjalankan industri batu bara dan baja mereka di bawah manajemen Bersama. Ke Enam negara tersebut terdiri dari Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg yang pada tahun 1952 Komunitas batu bara dan baja ini dibentuk. Kemudian, setelah suksesnya kerjasama di bidang batu bara dan baja ini pada tahun 1957, ke enam negara pendiri tadi memperluas kerjasama mereka pada bidang ekonomi dan bidang lainnya. Dan diresmikan melalui penandatanganan dua perjanjian yaitu, menciptakan *European Economy Community (EEC)* dan juga *European Atomic Energy Community (Euratom)*. Setelah itu, pada tahun 1958 untuk pertama kalinya diadakan pertemuan majelis parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis. Dan majelis umum komunitas batubara dan baja Eropa berganti nama menjadi Parlemen Eropa.<sup>10</sup>

Di tahun 1960-an yang merupakan sebuah periode yang baik bagi perkembangan perekonomian, dimana negara-negara *EEC* berhenti untuk membebaskan bea masuk ketika mereka melakukan perdagangan satu sama lain. Dan juga, negara-negara *EEC* sepakat dalam hal pengendalian Bersama mengenai produksi pangan. Selain itu juga, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (*European Free Trade Association*) dibentuk untuk dapat mempromosikan mengenai perdagangan bebas dan integrasi ekonomi kepada negara-negara yang tidak bergabung dalam (*EEC*) seperti, Denmark, Norwegia, Austria, Portugal, Swiss, Swedia dan juga Inggris. Kemudian, di

---

<sup>10</sup> Pasuhuk, Hendra. 2019. Sekilas Sejarah Terbentuknya Uni Eropa.

<https://www.dw.com/id/sejarah-terbentuknya-cikal-bakal-uni-eropa-70-tahun-lalu/a-48861327>

tahun 1962 *EEC* diberikan kebijakan oleh pertanian umum dalam mengontrol mengenai produksi pangan bersama.

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1965, Perjanjian yang menggabungkan eksekutif dari 3 Komunitas (*the European Coal and Steel Community, the European Economic Community, dan Euratom*) perjanjian ini ditandatangani dan mulai berlaku pada tanggal 1 juli 1967, di Brussel. Dimana komunitas eropa hanya memiliki satu pemerintahan administratif yaitu komisi dan eksekutif (dewan). Lalu, pada tahun 1968 ke enam negara anggota *EEC* tadi mulai melakukan penghapusan mengenai bea masuk dari barang barang impor yang masuk ke negara satu sama lain, yang dimana untuk pertama kalinya hal ini membuat perdagangan lintas batas lebih bebas untuk masuk ke negara lainnya. Dan mereka juga menerapkan hal ini untuk mengimpor barang mereka dari luar negeri. Dengan adanya ini membuat perdagangan dari ke enam negara dan seluruh dunia tersebut berkembang dengan pesat.<sup>11</sup>

Kemudian, terdapat tiga negara yang secara resmi bergabung dengan komunitas Eropa pada tahun 1973 yakni Denmark, Irlandia, dan Inggris. Dengan bergabungnya tiga negara tadi anggota dari komunitas eropa berjumlah 9 Negara. Di Tahun berikutnya 1981, Yunani bergabung kedalam komunitas eropa dan menjadi anggota ke 10. Selain itu, terdapat program penelitian eropa pertama yang diluncurkan pada tahun 1984 yaitu program '*Esprit*'. Lalu, Disusul 5 tahun kemudian oleh Spanyol dan Portugal yang bergabung di tahun 1986. Dan ditahun yang sama pula komunitas eropa menuju pasar tunggal. Lalu dilanjutkan pula pada peluncuran program '*Erasmus*' untuk memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang ingin belajar di negara Eropa lainnya.

Pada tahun 1992, perjanjian *Maastricht* ditandatangani di Belanda. Perjanjian ini yang menjadi tonggak utama dalam menetapkan aturan mengenai mata uang tunggal masa depan, kebijakan luar negeri dan keamanan, serta Kerjasama menangani keadilan dan urusan dalam negeri. Lalu, 'Uni Eropa' secara resmi dibuat perjanjian, dan perjanjian tersebut mulai berlaku pada 1 November 1993. Ditahun yang sama, terdapat 4 kebebasan yang terbentuk dari pasar tunggal seperti pergerakan bebas orang, barang, jasa dan uang. Tahun 1994, dibentuknya perjanjian wilayah Ekonomi Eropa yang mulai berlaku dan memperluas pasar tunggal ke negara negara *EFTA*. Lalu, dua tahun berikutnya 1995 Austria, Finlandia dan swedia bergabung dengan EU. Ditahun yang sama juga, perjalanan bebas perbatasan yang disebut dengan perjanjian *Schengen* diberlakukan di 7 negara (Belgia, Perancis, Jerman, Luksemburg, Belanda, Portugal, dan Spanyol). Dimana para wisatawan bebas berkunjung dan berpindah negara tanpa

---

<sup>11</sup> European Union, History of EU

[https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu\\_en](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_en)

adanya kontrol paspor di perbatasan. Selanjutnya, perjanjian Amsterdam ditandatangani di atas pencapaian perjanjian *Maastricht* sebagai rencana untuk mereformasi Lembaga Lembaga Uni Eropa dan perjanjian ini mulai berlaku tahun 1999. Dan tahun 1999 juga, Euro diperkenalkan untuk transaksi komersial dan keuangan di 11 negara.

Lalu, uang kertas dan uang koin menjadi mata uang legal yang digunakan di 12 negara EU pada tahun 2002. Dan Pada tahun 2004, terdapat 10 negara baru yang bergabung dengan EU yaitu siprus, malta, Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Dilanjutkan dengan bergabungnya Bulgaria dan Rumania tahun 2007. Sampai pada akhirnya jumlah negara EU menjadi 27 negara anggota. Dan di tahun 2013, kroasia menjadi negara ke 28 yang bergabung dengan EU.

### Peran Uni Eropa

Uni Eropa merupakan sebuah Organisasi pemerintah Internasional yang beranggotakan negara negara Eropa dan pada dasarnya negara negara tersebut menyerahkan Sebagian kedaulatan mereka kepada Uni Eropa yang disebut dengan Supranational *IGO*. *EU (European Union)* sendiri dibentuk untuk mencapai tujuan tujuan yang telah disatukan melalui kebijakan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara negara anggota. (Daniel S. Papp, 2002: 84).



Perjanjian *Maastricht* tahun 1993 merupakan sebuah tonggak berdirinya<sup>12</sup> Uni Eropa, dan menetapkan 3 pilar utama kerja sama di dalamnya yaitu:

<sup>12</sup> SKEMA HUBUNGAN KERJASAMA UNI EROPA DALAM PILAR JUSTICE AND HOME AFFAIRS  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7614/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

- *European Community*, sebuah pilar yang berkonsentrasi terkait pada kebijakan dibidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup. Yang mana pilar ini sebagai kerangka hukum, untuk mewadahi kebijakan komunitas yang berhubungan dengan pasar tunggal (*single market*), perdagangan internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi dan sumber daya.
- *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* adalah pilar yang berfokus pada kebijakan luar negeri. sebagai instrumen atau lembaga, yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan/atau menyatukan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya, yang akan ditentukan dan diterbitkan atas nama EU sebagai kebijakan bersama.
- *Justice and Home Affairs (JHA)*, merupakan pilar yang berkonsentrasi pada kemitraan yang berfokus pada kasus pidana/tindak kriminal. ini juga dikenal dengan istilah lain, *Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters (PJCC)*, Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum pada *Amsterdam Treaty dan The Treaty of Nice* yang menangani kerjasama di bidang hukum perdata dan pidana, kebijakan imigrasi dan suaka, pemantauan pengendalian perbatasan, pengendalian lalu lintas narkoba, kerjasama kepolisian dan pertukaran informasi. Pilar ini bertujuan untuk mengatur kerja sama dinas keamanan di negara-negara anggotanya dan melibatkan penggunaan beberapa aturan yang disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah pidana.

### **Studi Kasus**

Berawal pada kasus Yunani yang merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang mengalami krisis finansial. Krisis ini disebabkan karena faktor mata uang (*Euro*) yang mereka gunakan. Selain itu, juga disebabkan oleh kurang disiplinnya anggaran serta buruknya administrasi perpajakan di negara nya seperti terjadinya korupsi, pemborosan, dan manipulasi pembukuan negara tersebut. Dengan terjadinya krisis ini, memberikan dampak yang signifikan dan dirasakan oleh negara negara eropa lain nya yang berpengaruh pada level regional. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka nilai mata uang *Euro* akan jatuh dan mengancam ketahanan ekonomi Uni Eropa. Yunani sendiri memiliki jumlah rasio utang tertinggi pada tahun 2012 yaitu 150% per PDB.

Pada akhirnya, untuk mengatasi krisis tersebut dilakukan lah *bailout* ke negara negara Uni Eropa yang terkena krisis. Walaupun hal tersebut tidak dapat membantu pemulihan ekonomi secara keseluruhan, tetapi paling tidak *bailout* tersebut bisa membantu mencegah *collapse* nya perekonomian Uni Eropa. Dan sambil menunggu negara Uni Eropa lainnya membenahi dan menjaga perekonomian negara nya agar tidak terkena krisis. Selain melakukan *bailout*, sebanyak 26 pemimpin negara Eropa

dari 27 negara anggota setuju dengan Langkah yang diambil oleh Jerman dan Prancis untuk memperketat anggaran negara EU untuk menyelamatkan zona Euro tersebut.

Selain itu juga, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh EU yaitu membuat dan melakukan program baru untuk dijalankan oleh negara anggota, membuat Perjanjian *Euro plus* yang dimana perjanjian ini berisikan tentang pemerintahan ekonomi dan komitmen kedepan dalam program Reformasi nasional. Dengan adanya upaya reformasi tersebut dapat memberikan peraturan yang lebih ketat dan bisa dipatuhi oleh seluruh anggota, dan bisa mengatasi permasalahan krisis secara perlahan agar bisa memajukan Uni Eropa menjadi kekuatan ekonomi di dunia.

## **REFERENSI**

Ismail, 2010. Sejarah dan Perkembangan Uni Eropa.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7614/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal, 20 september 2022.

Rusyane, Ellen. 2009. Lembaga Uni Eropa dan Pembuatan Keputusan.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18963/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal, 20 september 2022.

Pasuhuk, Hendra. 2019. Sekilas Sejarah Terbentuknya Uni Eropa.

<https://www.dw.com/id/sejarah-terbentuknya-cikal-bakal-uni-eropa-70-tahun-lalu/a-48861327>, diakses pada tanggal, 20 september 2022.

Nugraha, [Fajar Muhammad. 2012. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa.](#)

[Sejarah Terbentuknya Uni Eropa | Nederindo](#), diakses pada tanggal, 20 september 2022.

# UNI AFRIKA (*AFRICAN UNION*)

Satri Syafira

## Sejarah Uni Afrika

Pada hakikatnya, Uni Afrika (*African Union*) merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki andil besar untuk daerah regional Afrika yang dibentuk sejak tahun 2002. Umumnya, organisasi ini dianggap sebagai penerus dari Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of African Unity*) sebelumnya. Dalam rangka memperkuat integrasi serta relasi antar negara-negara anggota, Uni Afrika juga menjadi organisasi yang memperkuat suara Afrika di kancah internasional, menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika yang menyelesaikan berbagai ruang lingkup masalah sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggotanya.<sup>13</sup> Uni Afrika memiliki lebih banyak kepengurusan dengan tugas-tugas dan fungsi khusus tentunya hal ini terlihat dari bagaimana keseriusan para pemimpin Afrika dalam rangka membangun kawasan Afrika ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal pembangunan ekonomi agar lebih stabil dan juga dalam hal stabilitas keamanan Kawasan

Umumnya, dapat diketahui bahwa sejarah terbentuknya Uni Afrika tidak dapat dipisahkan dari bagian terbentuknya *Organisation of African Unity* (OAU), yang mana dengan adanya pembentukan OAU pada tanggal 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia yang beranggotakan 32 negara yang mana pada waktu itu sudah menjadi bagian dari negara merdeka. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat penambahan jumlah negara anggota OAU yang diamati dilakukan secara bertahap yaitu bergabungnya sejumlah 21 negara sehingga menjadi 53 negara. Tentunya, landasan OAU bekerja berdasarkan Piagam OAU yang telah mendapatkan kesepakatan dari banyak pihak dan disetujui antar negara-negara anggota OAU dan Abuja Treaty pada tahun 1991 tentang pembentukan *African Economic Community*. Setelah itu, pada tahun 1990-an para pemimpin Afrika mulai berdiskusi untuk membicarakan mengenai perlunya perubahan terhadap bentuk OAU yang mana diharuskan untuk merefleksikan tantangan dan

---

<sup>13</sup> Levina Chairunnisa, "Peran Uni Afrika dalam Menangani Kelompok Militan Boko Haram di Nigeria", JOM FISIP, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016, Hal. 1-2.



problematika dalam dunia yang berubah. Tak terlepas dari sejarah terbentuknya OAU, pembentukan Uni Afrika kemudian dibentuk dengan fokus untuk memberikan dukungan terhadap kebebasan dari kolonialisme dan apartheid yang menjadi ujung tombak bagi pembangunan dan persatuan Afrika.<sup>14</sup>

Berdasarkan historisnya, visi yang dimiliki Uni Afrika sebenarnya termasuk bagian dari upaya untuk mempercepat proses integrasi Afrika dari berbagai kasus perang sipil dan konflik semacamnya, memberikan dukungan terhadap ekonomi global negara-negara Afrika dalam ekonomi global, mengatasi berbagai macam permasalahan sosial, ekonomi dan politik yang seringkali terjadi di benua Afrika. Dengan terbentuknya Uni Afrika, banyak harapan negara ini dalam meningkatkan perekonomian negara yang jauh lebih stabil lagi dan menjaga stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan sejarahnya sebagai organisasi Kawasan, Uni Afrika berhak mencampuri urusan internal negara anggotanya jika terjadi hal-hal yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas perdamaian dan juga keamanan Kawasan negara nya.

### **Peran Uni Afrika**

Adanya kegagalan masyarakat internasional dalam hal turut campur tangan terhadap masalah di Benua Afrika, terutama kegagalan untuk mencegah kejahatan genosida yang terjadi di Rwanda tentunya memperkuat pembentukan organisasi kawasan Afrika yang dijadikan sebagai wadah untuk mencari solusi bagi masalah-masalah terutama masalah konflik dan perang sipil yang seringkali terjadi di Afrika.

Pada tahun 1999 di Sierte, Libya OAU berubah menjadi Uni Afrika. Sebagai organisasi regional dimana Uni Afrika mempunyai misi untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik dan juga keterbukaan dalam bidang politik selain berfokus dalam mengedepankan kerjasama di bidang keamanan kawasan. Undang-Undang dari Uni Afrika kemudian ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2000 dengan peresmian organisasi yang terjadi pada bulan Juli

---

<sup>14</sup> Dilansir dari: <https://www.kemlu.go.id/> pada 26/10/2022.

2002. Semua negara-negara Afrika menghadiri peresmian tersebut kecuali Maroko karena menentang keanggotaan dari Sahara Barat. Dengan adanya pembentukan Uni Afrika ini diharapkan Uni Afrika dapat menjadi aktor perdamaian dan keamanan kawasan di Afrika. Sehingga dalam menanggapi konflik yang terjadi di Kongo, Uni Afrika sebagai organisasi kawasan turut mengambil andil besar dan mulai memberikan langkah yang tegas dan tepat.<sup>15</sup> Tidak hanya itu masyarakat internasional juga mengancam keras konflik yang terjadi di Kongo, karena pada kenyataannya di lapangan yang menjadi korban adalah anak-anak balita dan juga kaum perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan juga seksual. Sehingga banyaknya terjadi berbagai macam pelanggaran HAM, berbagai macam bantuan juga disalurkan oleh masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga bantuan internasional untuk membantu korban dan juga para pengungsi seperti obat-obatan makanan dan juga air bersih.

Sebagai sebuah organisasi regional, tantangan yang dihadapi oleh Uni Afrika sangatlah berat, baik dari segi internal maupun eksternal kawasan tersebut. Bila dibandingkan sekilas dengan organisasi regional di kawasan Asia, misalnya, jelas sekali terlihat bahwa Uni Afrika masih belum dapat menunjukkan pengaruh atau eksistensinya di dunia internasional. Ada beberapa faktor terkait dengan perkembangan regionalisme di Afrika ini. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah kondisi geografi Afrika yang didominasi oleh wilayah gurun yang tandus, teknologi dan sumber daya manusia yang kurang berpendidikan, dan banyaknya angka kriminalitas seperti pelanggaran HAM, terorisme dan masalah-masalah internal lainnya. Kondisi tersebut membuat negara-negara maju menjadi enggan untuk memulai penanaman modal atau investasi di Afrika.

Kondisi geografi suatu negara memang tidak mungkin untuk diubah, tetapi faktor lain seperti seperti teknologi, sumber daya manusia, dan tingkat kriminalitas di wilayah Afrika merupakan variabel yang bisa diubah. Hal pertama yang harus diubah adalah mengenai sumber daya manusia Afrika yang kurang ahli. Organisasi-organisasi regional, misalnya Uni Afrika dan pemerintah seharusnya mengadakan suatu pelatihan

---

<sup>15</sup> Zulkarnain, “Peran Uni Afrika dalam Menyelesaikan Konflik di Kongo” Jurnal Ilmu dan Budaya, dilansir dari: <http://repository.unas.ac.id/>

bagi masyarakat Afrika sehingga tenaga kerja masyarakatnya dapat memaksimalkan usaha-usaha dalam negeri. Apabila sumber daya manusia di Afrika dapat ditingkatkan ke tingkat profesional, maka perekonomian Afrika akan dapat ditingkatkan juga. Kedua, masalah teknologi. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik, teknologi juga akan dapat ditingkatkan ke skala global. Ketiga, masalah kriminalitas yang sulit sekali diselesaikan.

Jika masalah yang terjadi di Afrika dengan tingkat kriminalitas yang minim, maka dapat dipastikan banyak negara maju mungkin tidak akan enggan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Afrika. Jika dikaji lebih lanjut, tentunya hal ini dapat memajukan regionalisme di Afrika dengan memperkuat stabilitas kerjasama dengan negara lain.

### **Studi Kasus: Intervensi Uni Afrika dalam Konflik Seleka**

Dengan adanya kasus diskriminasi yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Seleka di Afrika Tengah terdapat pada bidang ekonomi dan politik. Diskriminasi pada bidang ekonomi adalah pemerintah menguasai kekayaan alam yang menyebabkan terjadinya ketidaksejahteraan di masyarakat Afrika Tengah. Wilayah utara Afrika Tengah tidak mendapatkan pembangunan secara merata karena pembangunan di Afrika Tengah hanyalah terpusat di pusat kota. Sedangkan dalam bidang politik rakyat di wilayah utara Afrika Tengah tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki kekuasaan pemerintahan karena keterlibatan rakyat wilayah utara Republik Afrika Tengah masih sangat sedikit. Republik Afrika Tengah terletak di wilayah yang rawan konflik. Barang-barang seperti senjata dan orang bebas keluar masuk perbatasan karena pemerintah tidak memiliki kapabilitas untuk mengontrol wilayah perbatasan.

Keadaan negara yang lemah dan petugas keamanan yang tidak bisa menjaga seluruh wilayah Republik Afrika Tengah membuat mudahnya akses untuk keluar masuk ke negara lain. Banyaknya kelompok-kelompok bersenjata yang masuk ke Republik Afrika Tengah membuat mudahnya akses senjata ilegal. Sebagian besar senjata masuk dari negara Chad, Sudan, dan Republik Demokratik Kongo yang terjadi

perang antar kelompok etnis yang memperebutkan Sumber Daya Alam yang ada di negara tersebut.<sup>16</sup> Hal ini berdampak negatif pada situasi keamanan di Republik Afrika Tengah, pemerintah yang tidak mampu mengontrol wilayah perbatasan dan lemahnya militer serta tidak adanya peran negara di sebagian besar wilayah membuat kelompok-kelompok bersenjata aman berada di wilayah Republik Afrika Tengah.

*Mission Internationale de Soutien a la Centrafrique Sous Africaine* (MISCA) adalah misi yang dibentuk oleh dewan perdamaian dan keamanan Uni Afrika yang didukung penuh oleh PBB. Misi ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Jean-Marie Michel Mokoko dari Republik Kongo sebagai perwakilan khusus Uni Afrika di Republik Afrika Tengah. Ia sudah berpengalaman dalam misi perdamaian dan keamanan serta telah memegang posisi kepala staf pertahanan Angkatan bersenjata Kongo. Tujuan adanya MISCA yaitu untuk melindungi warga sipil, memulihkan ketertiban ruang untuk tersalurkannya bantuan kemanusiaan dan mendukung *disarmament, demobilization and reintegration* (DDR) dan *Security Sector Reform* (SSR).<sup>17</sup>

Uni Afrika diharapkan terus berkembang dalam menyelesaikan konflik-konflik yang sering sekali terjadi di wilayah Afrika. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Uni Afrika telah bertindak secara tepat dan efisien baik secara waktu serta dengan tepat menanggapi situasi darurat di lapangan. Sebagai organisasi kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan Afrika, Uni Afrika menunjukkan komitmennya dalam menciptakan perdamaian serta mempromosikan bagaimana terciptanya perdamaian, keamanan dan stabilitas di benua Afrika.

## REFERENSI

Chairunnisa, Levina. 2016. *Peran Uni Afrika dalam Menangani Kelompok Militan Boko Haram di Nigeria*. JOM FISIP. 3(2).

<https://www.kemlu.go.id/>

---

<sup>16</sup> Rozi Rastafari et al., “Pemberontakan Seleka di Republik Afrika Tengah”, UNEJ Jurnal, Vol. 1 No. 1, 2015, Hal. 9-10.

<sup>17</sup> Andini Syarif, “Upaya Uni Afrika Menyelesaikan Konflik Seleka – Anti Balaka Di Republik Afrika Tengah 2013 – 2018” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dilansir dari <http://repository.umy.ac.id/>.

Rozi Rastafari et al., 2015. *Pemberontakan Seleka di Republik Afrika Tengah*. UNEJ Jurnal. 1(1).

Syarif, Andini. *Upaya Uni Afrika Menyelesaikan Konflik Seleka – Anti Balaka Di Republik Afrika Tengah 2013 – 2018*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dilansir dari <http://repository.umy.ac.id/>.

Zulkarnain. *Peran Uni Afrika dalam Menyelesaikan Konflik di Kongo*. Jurnal Ilmu dan Budaya, dilansir dari: <http://repository.unas.ac.id/>.